

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ali A. (2005). *Pelindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dibidang Kepemilikan Tanah*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Bambang, P. (1995). *Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kuantitatif, Kuantitatif Dan Mixed*. Yogyakarta.
- Dianto, B & Gunawan W. (2011). *Enam Dekade Ketimpangan Masalah Penguasaan Tanah Di Indonesia*. Jakarta: Bina Desa.
- Hadjon, M. P. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan.
- Maria S.W. (2001). *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Maria S.W. Sumardjono. (2001). *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsin, H. (2006). *Iktisar Ilmu Hukum*. Jakarta: iblam.
- Nogroho, S. A. (2015). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumannya*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sahnan. (2016). *Hukum Agraria Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Salim, H. S. (2002). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.

Singarimbun, dan Efendi, Sofyan. (2014). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Sitorus, O. & H.M Zaki Sierrad. (2006). *Hukum Agraria Di Indonesia Konsep Dasar Dan Implementasinya*. Indonesia Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah.

Soerodjo, I. (2014). *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (Hpl) Eksistensi, Pengaturan Dan Praktik*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Soetiknyo, I. (2008). *Proses Terjadinya UUPA*. Yogyakarta: Gajah Mada University.

Suratman & Philips Dillah. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Usman, R. (2012). *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widyana, I. M. (2009). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati Aneska.

Jurnal ★

Amir, Arivan. (2019). Pengalihan Hak Penguasaan Tanah Menurut UUPA dalam Rangka Pendaftaran Tanah Pertama Kali. *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Vol. 8. No. 1.

Azzahra, F. (2019). Status Hak Tanah Penduduk Desa Dalam Kawasan Hutan Perum Perhutani. *Jurnal Hukum Ilmiah Pendidikan Dan Kewarganegaraan*. Vol. 4. No. 1.

Budhayati, C. T. (2018). Jaminan Kepastian Kepemilikan Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Menurut Uupa. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 2

Hastiyanto, F. (2019). Perencanaan Pembangunan Dan Gerakan Sosial Dalam Reforma Agraria Di Indonesia. *Jurnal Studi Kepemerintahan*. Vol. 4. No. 2.

Ihsan, M., Andi Arafah, Andi Rhida. (2022). Studi Konflik Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) Di Desa Sambabo Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Maje. *Pangale Journal Of Forestry And Environment*. Vol. 2. No. 1.

- Kumara, I. M. C. G., Wijaya, I. K. K. A., & Suryani, L. P. (2021). Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 2. No. 3.
- Mustafa, F., & M. Ilham, A. (2022). Penerbitan Sertifikat Hak Pakai Diatas Tanah Hak Milik Oleh Pemerintah Daerah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*. Vol.4 No.2.
- Nuraini, L. & Dkk. (2014). Perlindungan Hukum Hak Keperdataan Warga Masyarakat Di Atas Tanah Yang Berada Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Sk Menteri Kehutanan Ri No. Sk. 463/Menhut-Ii/2013 Dikota Batam. *Jurnal Hukum Usu*. Vol. 2. No. 3.
- Nuraini, L. & Haryanti, D. (2021). Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Hak Atas Tanah Ber-Status Quo Di Pulau Galang. *Jurnal Ius Quai Iustom*. Vol. 28. No. 2.
- Nurlinda, I. (2018). Perolehan Tanah Obyek Reformasi Agraria (Tora) Yang Berasal Dari Kawasan Hutan: Permasalahan Dan Pengaturannya. *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung*. Vol. 2 No. 2.
- Pota, A., & Suyaman M. P., & Sri, S. N. (2022). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan Di Lingkungan Batulapisi Kabupaten Gowa. *Jurnal kajian dan penelitian hukum*, Vol. 4. No. 2.
- Rejekiningsih, T. (2016). Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia). *Yuridis Jurnal Hukum*. Vol. 5 No.2.
- Rohmat, J & Djurdjani. (2020). Pemetaan Objek Reforma Agraria dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus di Kawasan Banyuasin). *BHUMI Jurnal Agraria dan Pertanahan*. Vol. 6. No. 2.
- Sari, R.M., (2001). Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Mulawarman Law Reviuw*. Vol. 6. No. 1.
- Sudiro, A. A., & Putra, A. P. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*. Vol. 5. No. 1.

Internet

[Http://bintankab.go.id/geografis](http://bintankab.go.id/geografis) diakses pada tanggal 25 Agustus 2022

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen /KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah